

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Distribusi Frekuensi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, studi kasus pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melatar belakangi penelitian ini adalah KPI sebagai lembaga baru berdiri, melalui UU Penyiaran N0.32 Tahun 2002 diharapkan mampu untuk menjadi regulator penyiaran yang dapat mengatasi unsur-unsur negatif dari keberadaan media massa penyiaran dari masalah *content* siaran dampak efek media massa pada perilaku masyarakat, masalah teknis siaran, dan juga berdirinya KPI sebagai lembaga independen merupakan langkah pemisahan sistem penyiaran terhadap sistem politik, akan tetapi secara obyektif KPI berdiri baru Tahun 2003 dan sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga regulator penyiaran dibawah pemerintah, hal ini dijadikan pokok permasalahan dalam merumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan distribusi frekuensi siaran yang dilaksanakan oleh KPIDIY dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pendistribusian frekuensi tersebut

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori-teori komunikasi, teori hubungan komunikasi dengan sistem yang lain (sistem politik, sistem ekonomi), teori sistem pers Indonesia, proses komunikasi dan media massa penyiaran, dari analisis teori tersebut ditemukan bahwasanya hubungan antara KPI dengan sistem pemerintahan tidak berjalan sinergis, peran fungsi distribusi frekuensi masih belum dijalankan KPIDIY secara independen hal ini berdampak pada pelaksanaan fungsi distribusi frekuensi tidak dapat berjalan, hingga permasalahan ini membawa pada sistem regulasi penyiaran yang menjadi *stagnan* di DIY, karena dari konflik tersebut menjadikan lembaga-lembaga regulasi tidak memiliki landasan regulasi karena dipenuhi dengan proses *judicial review* baik PP Pemerintah maupun landasan-landasan regulasi KPI sendiri, berdasarkan kepentingan ekonomi politik komunikasi di DIY terjadi penjualan lembaga siaran dengan modus pergantian manajemen atau penjualan dibawah tangan, hal ini sangat berbahaya mengingat media massa mampu mengkonstruksi perilaku masyarakat, berdasarkan tekstual Indonesia penganut sistem pers "bebas bertanggung jawab" yang direduksi dari sistem pers tanggung jawab sosial (*social responsibility*), KPIDIY sebagai regulator menerapkan EDP (Evaluasi Dengar Pendapat) yang dihadiri oleh elemen masyarakat dan eksekutif dan legislatif hal ini menunjukkan usaha KPIDIY dalam mewujudkan penyiaran yang demokratis

Dalam penelitian ini banyak dianalisis dengan teori-teori yang kritis dan membangun, yang nantinya akan terlihat bagaimana pentingnya sebuah lembaga regulasi penyiaran yang independen seperti KPI untuk mewujudkan kondisi sistem penyiaran yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan perinsip-perinsip pers Indonesia yang bebas "bertanggung jawab", besarnya kepentingan ekonomi politik komunikasi pada lembaga-lembaga siaran, dampak dari distribusi frekuensi yang tidak tertata, hal ini menuntut pada lembaga regulator penyiaran yang independen dan professional.